



# Buletin Parlementaria

Nomor 970/VIII/2017 Agustus 2017



**Hentikan Peradilan  
Sesat/KPK**

**Masjid Al-Aqsa Harus  
Segera Dibuka Kembali**

**RUU Pemilu  
Disahkan Aklamasi  
oleh Enam Fraksi**

TIDAK  
DIPERJUAL  
BELIKAN



Suasana pengambilan keputusan RUU Pemilu diwarnai *walk out*

## RUU Pemilu Disahkan Aklamasi oleh Enam Fraksi

Rapat Paripurna DPR RI bersama Pemerintah berhasil mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilihan Umum Jumat (21/7) dini hari di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Setelah melalui proses yang panjang dan dinamis, pengesahan ini disetujui oleh pemerintah dan 6 Fraksi di DPR secara aklamasi. Sementara 4 Fraksi lainnya, yakni Fraksi Gerindra, Fraksi PAN, Fraksi Demokrat, dan Fraksi PKS termasuk tiga Pimpinan Dewan Taufik Kurniawan, Agus Hermanto dan Fadli Zon memutuskan untuk tidak ikut mengambil keputusan dan *walk out*. Sedangkan Fahri Hamzah ikut mendampingi Setya Novanto

sebagai Pimpinan Sidang, meski secara pribadi memilih paket B tetapi tidak *walk out*, karena secara tatib harus minimal ada dua Pimpinan.

“Setelah kita lihat bersama, jumlah anggota secara fisik dengan jumlah total 538 dan yang pro opsi A jumlah 322, namun 216 memilih opsi B dan mempunyai pandangan berbeda, maka opsi A secara aklamasi kita putuskan, apakah disetujui?” ungkap Ketua DPR RI Setya Novanto disambut kata setuju

peserta sidang kemudian ditandai ketukan palu sebagai tanda pengesahan RUU Pemilu.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan dengan disahkannya RUU Pemilu menjadi UU maka setidaknya pelaksanaan pemilu serentak telah memiliki landasan hukum. Pemerintah setuju dilaksanakan tahapan berikutnya.

“Apa yang telah dibahas dalam 3.055 DIM dan 373 Pasal selama 9 bulan ini, dengan demikian segala peraturan



dalam RUU yang tengah diputuskan dalam paripurna ini termasuk masalah presidential threshold adalah sudah sesuai dengan amanat konstitusi UUD 1945 dan konstitusional,” ujar Tjahjo Kumolo saat membacakan pandangan pemerintah.

### Sangat Alot

Sebelumnya, Rapat Paripurna berlangsung sangat alot dan sempat diskors dari pukul 14.00 WIB untuk melakukan lobi-lobi antar fraksi, setiap fraksi mengirimkan dua utusannya untuk musyawarah. Rapat kemudian kembali dibuka pada pukul 22.30 WIB. Disusul mekanisme voting untuk menentukan pengambilan keputusan tetap dilakukan atau ditunda hingga Senin (24/07/2017) untuk melanjutkan forum lobi hingga mencapai musyawarah mufakat.

Lobi-lobi kemudian berhasil mengerucutkan lima opsi paket isu krusial menjadi dua pilihan, yakni Paket A dan

Paket B. Paket A, ambang batas presiden 20 - 25 persen, ambang batas parlemen 4 persen, sistem pemilu terbuka, alokasi kursi per dapil 3-10 kursi dan metode konversi suara saint lagu murni.

Paket ini sama dengan usulan pemerintah, terutama dalam hal ambang batas presiden. Terdapat enam fraksi yang mendukung opsi ini yakni, Fraksi PDI-Perjuangan, Golkar, Hanura, PKB, PPP, dan Nasdem.

Sedangkan opsi Paket B meliputi ambang batas presiden 0 persen, ambang batas parlemen 4 persen, sistem pemilu terbuka, alokasi kursi per dapil 3-10 kursi, dan metode konversi suara kuota hare dan masih mengutamakan musyawarah mufakat. Ketiga fraksi yang mendukung, yakni Gerindra, PKS, dan Demokrat.

Ketiga fraksi berpandangan isu krusial ambang batas presiden bukan untuk ranah voting dan mengusulkan lobi dilanjutkan hingga Senin guna mencapai titik temu. Sebab, ketentuan angka ambang batas presiden sebagai salah satu isu utama dipandang pengingkaran terhadap keputusan Mahkamah Agung mengenai pemilu serentak.

“Atas pertimbangan itu, kami dari Fraksi Demokrat tidak ikut mengambil bagian dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambil melalui voting. Memang betul voting adalah mekanisme yang demokratis, tetapi konstitusionalitas sebuah norma tidak boleh di votingkan,” tegas Wakil Ketua Pansus Pemilu Benny K Harman (F-Demokrat).

Sementara Fraksi PAN, salah satu parpol pendukung pemerintah menolak dilakukan voting dan tetap mengutamakan musyawarah mufakat sebagaimana esensi sila ke-4 Pancasila. Dalam pandangannya, Wakil Ketua Pansus Pemilu Yandri Susanto (F-PAN) menawarkan jalan tengah, yaitu presidential threshold 10 persen dan metode konversi suara kuota hare.

“Sejak awal kami menghendaki musyawarah mufakat dan kami berpegang teguh pada prinsip kami. Sehingga tahapan berikutnya, dalam proses pengambilan keputusan tingkat II kami nyatakan tidak akan ikut dan bertanggung jawab atas keputusan politis. Namun, kami tetap menghargai semua perbedaan. Perbedaan biasa saja dan saya yakin kita bisa tetap tersenyum dan menghargai satu sama lain, karena lobi-lobi sudah berjalan sangat panjang namun tidak ada kata mufakat,” tandas Yandri Susanto menambahkan. ■

(anr.mpi), foto : jayf/hr

**PENGAWAS UMUM**  
Pimpinan DPR RI  
**PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH**  
Achmad Djuned, S.H., M.Hum. (Sekjen DPR RI)

**WAKIL KETUA PENGARAH**

Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Persidangan)

**PIMPINAN PELAKSANA**

Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

**PIMPINAN REDAKSI**

Drs.Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

**WK. PIMPINAN REDAKSI**

Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak),

Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis),

Nita Juwita, S.Sos (Kasubag MedSos dan Website)

**REDAKTUR**

Mastur Prantono, Suciati, S.Sos

**SEKRETARIS REDAKSI**

Hasri Mentari, Guntur Dewanto

**ANGGOTA REDAKSI**

Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati, Muhammad Husen,

Sofyan Efendi, Virgianne Meiske Patuli, Devi Iriandi, Hendra

Sunandar, Surahmat Eko, Ria Nur Mega

**REDAKTUR FOTO**

Eka Hindra, Iwan Armanias

**FOTOGRAFER**

Rizka Arinindy, Supardi, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah,

Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana, Arief

Rachman, R. Kresno P.D Moempoeni, Azka Restu Fadilah

**ADMINISTRASI FOTO**

Bagus Mudjiharjanto

**ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA**

Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI

Gedung Nusantara II Lt. 3

Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta

Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341,

e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com, www.dpr.go.id/berita



### PENERBITAN

**PIMPINAN PENERBITAN**

Djustiawan Widjaya, S.Sos. M.AP (Kabag Penerbitan)

**PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI**

Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

**STAF PRODUKSI**

Subadri, S.E, Barliansyah,

Fathurahman, Abdul Kahfi, S. Kom

**DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**

Drs. Karyanto (Kasubag Distribusi)

**ADMINISTRASI**

Sjaefudin, S.Sos

**KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**

Mujiono

**STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**

Arif, Lamin, Remon,Yuliana Puspita,

Ifan, Siti Rondiyah, Oji Saputra

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : penerbitandpr@gmail.com

**HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN**

# Masjid Al-Aqsa Harus Segera Dibuka Kembali

Penutupan dan tindak kekerasan yang dilakukan oleh tentara Israel terhadap jamaah Masjid Al-Aqsa yang menyebabkan tewasnya tiga warga Palestina dan ratusan korban lainnya dikecam oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. Fadli meminta Masjid Al Aqsa segera dibuka kembali.

“Tindakan Israel itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB yang tidak dapat ditoleransi. Masjid Al-Aqsa dan The Dome of the Rock harus dipertahankan sebagai tempat suci yang terbuka untuk diakses oleh semua umat muslim,” tegas Fadli, dalam rilis kepada Parleментарia, Selasa (25/7/2017).

Pimpinan DPR Korpolkam ini menegaskan, penutupan dan pembatasan sepihak masjid Al-Aqsa oleh otoritas Israel jelas menyalahi kesepakatan yang sudah dibuat sebelumnya. Pembatasan itu juga melanggar hak asasi umat muslim untuk bebas melakukan ibadah. Menurutnya, itu tindakan provokatif yang ingin memperkeruh keadaan

“Israel harusnya tidak mengubah status quo kompleks Al-Aqsa. Saya mendukung sikap Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri Indonesia yang melakukan kecaman terhadap tindakan Isarel tersebut. Sikap itu sudah tepat, mengingat kekerasan dan pembatasan yang dilakukan Isarel terhadap muslim Palestina tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun,” imbuhnya.

Fadli berharap pemerintah Indonesia juga menggunakan pengaruhnya dalam forum-forum internasional untuk terus mendukung



Wakil Ketua DPR Korpolkam Fadli Zon

kemerdekaan Palestina. “Suara Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar, memiliki nilai penting dan strategis bagi agenda kemerdekaan Palestina,” tutup politisi asal dapil Jawa Barat itu. ■

(sfrmp), foto : arlief/hr.





Ketua DPR Setya Novanto saat menguji nonakademis calon doktor hukum Anggota Komisi III DPR Adies Kadir

## Ketua DPR Didaulat Jadi Penguji Calon Doktor di Untag

Ketua DPR Setya Novanto didaulat menjadi penguji non akademis calon doktor hukum Adies Kadir yang juga menjabat sebagai Anggota Komisi III DPR. Kepada Adies Kadir, Novanto bertanya mengenai evaluasi periodisasi jabatan hakim.

**N**ovanto sapaan akrabnya, mencontohkan hakim yang berada di Amerika Serikat bertugas hingga umur 70 tahun. "Seandainya dipotong menjadi 65 tahun, bisa jadi masalah, hakim tingkat pertama dan banding akan hilang 50 persen. Sedangkan kebutuhan hakim sekarang ada 4 ribu. Sekarang yang disetujui oleh pemerintah ada 1.684 calon hakim. Tentu ini menjadi harus hati-hati dalam periodisasi," kata Politisi F-Golkar dalam ujian terbuka di Gedung Graha Wiyata, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Selanjutnya, ia menanyakan soal evaluasi periodisasi jabatan hakim. Novanto menyebut perekrutan hakim untuk menjabat di 86 lembaga peradilan di Indonesia harus segera dilakukan.

Anggota Komisi III DPR Adies Kadir, dalam disertasinya menyebutkan, untuk periodisasi kehakiman sebaiknya ditiadakan, karena hakim lebih mudah di intervensi dengan harapan setiap 5 tahun dapat dipilih kembali. "Main save saja dalam memutus perkara, apalagi dekat dengan politisi, yang penting bisa terpilih setiap periodisasinya," ujarnya.

Ia juga menekankan kembali, dalam Trias Politika dimana kekuasaan negara terdiri atas tiga macam kekuasaan, eksekutif dan yudikatif. Sedangkan, pada kenyataannya lembaga peradilan masih tidak bisa terlepas dari bayang-bayang eksekutif. Misalnya, ada hakim yang juga menjadi pejabat negara.

Selain Novanto, tim penguji non akademis lainnya adalah Wakapolri Komjen Syafruddin, Anggota Komisi III DPR Junimart Girsang. Kemudian, ada 10 orang penguji dari kalangan akademis salah satunya Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali.

Dalam sidang terbuka ini, ia menyoroti kondisi kedudukan hakim di tanah air, Adies memperoleh gelar doktornya dengan predikat sangat memuaskan dalam indeks prestasi kumulatif mencapai 4,00. Adies mempertahankan disertasinya yang berjudul "Konsep Hakim sebagai Pejabat Negara dalam Perspektif *ius Constitutum* dan *ius Constitutum* di Indonesia". ■

(ikmp), foto : jekawir

# Pemerintah Kurang Merespon Balik Kasus TKI

Dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR yang dipimpin Wakil Ketua Syamsul Bachri, ditemukan laporan dari salah seorang LSM yang sudah mengunjungi tempat TKI di Malaysia, terungkap bahwa perlakuan pemerintah Malaysia di sana itu memang kadang-kadang diluar batas.



Wakil Ketua Komisi IX DPR Syamsul Bachri

“Masalahnya, respon balik yang dilakukan pemerintah Indonesia itu kurang. Ini yang akan kami klarifikasi,” ujar Syamsul di Kantor Walikota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, Jumat (21/7).

Terkait hal tersebut Komisi IX bersama dengan BNP2TKI dan Kementerian Tenaga Kerja bertekad untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh

para tenaga kerja yang ada di luar sana. “Mereka ingin pulang tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga mereka terkatung-katung di sana” lanjut Politisi F-PG tersebut.

Menanggapi kebijakan Pemerintah Malaysia dalam menerapkan e-kad (enforcement card), kata Syamsul, ternyata membawa dampak yang menyulitkan para TKI, karena untuk keperluan itu mereka

dikejar-kejar dan didatangi ke tempat kerja. “Mereka yang tidak memiliki dokumen-dokumen lengkap dikumpulkan di suatu tempat yang terkadang tidak memenuhi syarat,” ujar Wakil Ketua Komisi IX dari Dapil Sulsel itu.

Dalam Undang-Undang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, sambung dia, sudah diamanatkan bahwa di setiap kabupaten yang banyak mengirim tenaga kerja, harus ada lembaga layanan satu atap. “Di situ nanti tenaga kerja kita yang akan berangkat ke luar negeri tidak harus wara-wiri, tapi dengan datang ke satu tempat, layanan terpadu satu atap itu di situ akan selesai. Seperti kita dengar tadi sudah 6 bulan, sudah bayar Rp. 800.000,- tapi dokumen yang diperlukan tidak jelas,” ujar Syamsul dengan menegaskan, ini merupakan masalah-masalah yang harus diatasi dalam Undang-Undang Perlindungan Migran dan itu perlu untuk kita tindak lanjuti ke depan.

Lebih lanjut dikatakan, Komisi IX yang bermitra dengan Kemenaker dan BP2TKI itu akan mengundang Kemlu untuk membahas perlindungan tenaga kerja di luar negeri. “Demikian juga kami undang imigrasi untuk mengatasi persoalan dokumen yang diperlukan dalam rangka legalitas mereka ke luar negeri. Itu pihak-pihak yang biasa kami akan undang,” ujarnya.

Dia berharap, Undang-Undang tentang Perlindungan Migran Indonesia bisa segera disahkan sehingga semua pihak memiliki acuan yang jelas dalam memberikan perlindungan pekerja Indonesia, baik pada saat mau berangkat ataupun mau kembali ke Indonesia,” tutupnya. ■

(eno/mp). foto: eno/hr.

## Pendidikan Vokasi Bagi TKI Perlu Digalakkan

Perusahaan-perusahaan yang mengantarkan dan menyalurkan tenaga kerja diharapkan terlibat aktif, tidak hanya mengirimkan tenaga kerja saja akan tetapi mengetahui dimana tenaga kerja itu ditempatkan. Dengan demikian bisa memantau kondisi para TKI yang bekerja di luar negeri. tidak hanya menyerahkan kepada pemerintah saja.

“Jangan setelah ada masalah, baru melibatkan pemerintah. Sebaliknya jika tidak ada kendala atau masalah mereka diam-diam saja. Karena itu harus ada keseimbangan antara perusahaan-perusahaan pengirim tenaga kerja dan

pemerintah harus beriring bersama,” tegas Ketua Tim Kunspek Komisi IX Saleh Partaonan Daulay saat melakukan dialog dengan pemangku kepentingan ketenagakerjaan di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jumat (24/7).

Politisi PAN ini menyarankan kepada pemerintah agar menggalakan pendidikan vokasional, pelatihan-pelatihan kerja, pendidikan, keterampilan tenaga kerja bagi TKI-TKI purna yang sudah pulang. Mereka diharapkan bisa menginvestasikan



Ketua Tim Kunspek Komisi IX Saleh Partaonan Daulay

agar ke depan TKI yang berangkat ke luar negeri harus mempunyai keahlian dan bekal pendidikan.

Menurutnya jika mereka punya keahlian akan mendapatkan penghargaan yang lebih dari negara itu sendiri, kemudian akan mendapatkan upah yang layak. Dari segi perlindungan kalau legal, negara gampang memantau bila terjadi apa-apa dan negara bisa langsung hadir di sana.

Dalam kesempatan yang sama Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan Edi Muldjono menjelaskan, TKI dari Kabupaten Bangkalan bekerja di 6 negara yaitu Sinagapura, Hongkong, Taiwan, Malaysia, Brunei Darusallam, Arab Saudi. Pada tahun 2014 sebanyak 63 bekerja di Arab Saudi, dan di Malaysia 36 orang.

Tahun 2015 dari 6 negara paling besar di Malaysia dengan total 28. dari semua tenaga kerja yang di luar negeri sebanyak 66 untuk tahun 2016. Untuk TKI yang mempunyai permasalahan khususnya di Arab Saudi di Kabupaten Bangkalan ada satu yaitu atas nama Muhamad Sani Misrim permasalahannya yaitu kasus pembunuhan pada tahun 2010 masih dalam proses hukum. ■

(rni/mp), foto :runi/hr.

pendapatan yang mereka peroleh dari bekerja ke luar negeri untuk kepentingan keluarganya.

Bahkan diharapkan bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru, maka tentu saja itu akan berimbas positif bagi kehidupan masyarakat di sekitar mereka

serta berdampak luas bagi kehidupan sosial ekonomi mereka di Indonesia. Nantinya para TKI diharapkan tidak lagi bekerja ke luar negeri.

Pendapat yang sama juga disampaikan anggota Komisi IX Siti Masrifah, meminta kepada pemerintah

## Ke Depan, Perekrutan TKI Harus Lebih Baik

Tim kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI dipimpin anggota Komisi IX DPR Dewi Aryani (F-PDIP) menggelar rapat dengan Sekda Kabupaten Tegal, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Kepala Balai Latihan Kerja, Ketua BP3TKI, Kepala BPJS Ketenagakerjaan dan Perwakilan Keluarga Tenaga Kerja Indonesia dalam rangka pengawasan permasalahan pemulangan TKI dari Malaysia sebagai dampak kebijakan enforcement card (e-card) atau e-kad di Malaysia, Tegal, Jawa Tengah, Jumat (21/7).



Tim Kunspek Komisi IX DPR dipimpin Anggota Komisi IX DPR Dewi Aryani saat menggelar rapat dengan Sekda Kabupaten Tegal

“Dari hasil pertemuan ini, kami memang belum mendapatkan data akurat dari Pemda Tegal. Tetapi kami banyak mendapatkan temuan yang nantinya akan kami rapatkan dengan mitra kerja di Komisi IX, supaya pelaksanaan dan perekrutan TKI ke depannya lebih baik lagi,” kata Dewi.

Politisi daerah pemilihan

asal Jateng ini mengatakan, pada saat ini juga Komisi IX sedang menggodok RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PPILN) yang bisa menjadi payung hukum untuk menanggulangi segala permasalahan TKI di luar negeri yang ada di berbagai daerah di Indonesia.

“Tim Kunspek juga menemui TKI yang tidak ingin kembali ke luar negeri lagi, atas kasus ini pemerintah harus sudah siap dengan sarana dan prasarana misal peralatan latihan di BLK harus lebih modern, sehingga mereka bisa lebih produktif lagi dan sesuai target pasar,” ungkapnya.

Lebih lanjut Dewi Aryani akan meminta penjelasan dari kementerian terkait dan melakukan pendalaman klarifikasi kendala e-kad ini. “Kendalanya adalah pada sosialisasi, saya pernah melakukan sosialisasi e-kad di Kabupaten Tegal ini, peminatnya sangat luar biasa tapi pengetahuan tentang tata cara dan prosedur yang benar sangat minim,” ungkapnya.

“Oleh karena itu, pemerintah harus bisa jemput bola dengan cara sosialisasi ke daerah-daerah, jangan hanya diiklankan TV karena biayanya sangat besar dan belum tentu tepat sasaran,” pungkasnya. ■

(chas/mp) foto : chas/hr.



Tim Panja Ekonomi Regional (KER) BKSAP dipimpin Wakil Ketua BKSAP Juliari P. Batubara kunjungi Pontianak

## Panja KER BKSAP Bentuk Tim Kecil Soal Sawit

Panja Ekonomi Regional (KER) BKSAP akan membentuk tim kecil yang bertujuan untuk mendapatkan masukan secara lengkap terkait pelarangan sawit Indonesia di Eropa maupun pengembangan potensi ekonomi di wilayah perbatasan.

“Ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti khususnya soal agribisnis sawit, karet dan lada di Kalimantan Barat, kita cukup terkejut masih banyak petani lada yang menjual hasil ladanya di pinggir jalan hanya sebesar Rp 60 ribu padahal di pasar Internasional mencapai Rp 120 ribu perkilo,” terang Anggota BKSAP Jon Erizal (F-PAN) kepada Parlementaria, di Pontianak baru-baru ini.

Menurut Jon, masukan dari Kalbar perlu didorong dalam bentuk regulasi yang memihak para petani. “Ini perlu adanya dukungan regulasi, karena itu hasil rapat dengan Pemerintah Provinsi harus segera dibentuk tim kecil, yang bertugas

mendapatkan masukan setiap harinya, sehingga isu aktual tersebut dapat diangkat pada tataran kebijakan nasional,” kata Jon.

Jon menambahkan, selama ini persoalan sawit kurang mendapatkan perhatian dari pihak pemerintah. Karena itu pemerintah perlu mencontoh Afsel yang membawa persoalan kapas mereka pada sidang WTO. “Ini terkesan produk sawit Indonesia bermasalah seperti soal lingkungan, maupun pekerja anak, padahal jika dilihat ini hanya persoalan business to business (B to B),” jelasnya.

Jon mengatakan, produk luar negeri juga banyak yang bermasalah bahkan mengganggu kesehatan

namun pemerintah sendiri terkesan membiarkannya. Karena itu, lanjutnya, isu sawit ini harus ditindaklanjuti dan dibawa pada tingkat regional jadi kita mendapatkan masukan dari *bottom up* dan sebaliknya.

Hal senada disampaikan oleh Wakil Ketua BKSAP Juliari P. Batubara, menurutnya, temuan dan masukan dari Pemerintah Daerah Kalbar akan disampaikan saat raker dengan kementerian terkait.

Sementara, terkait larangan sawit di Eropa, terangnya, BKSAP akan terus melakukan fungsi diplomasi parlemen dengan membawa isu sawit pada saat sidang maupun bertemu dengan Parlemen Eropa.

Seperti kita ketahui, saat ini luas lahan sawit di Kalimantan Barat mencapai 1.3 juta Ha dengan total produksi CPO mencapai 1.1 juta ton (data 2014). Pemerintah daerah mencatat terdapat peningkatan minat masyarakat dalam mengembangkan industri sawit. Namun saat ini, masih terdapat berbagai tantangan antara lain kampanye anti sawit dari dalam dan luar negeri serta potensi kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2016. ■

(si), Foto: BKSAP/hr





# Pimpinan BKSAP Temui Gubernur Bali Bahas Persiapan Sidang Parlemen Dunia

Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR-RI Nurhayati Ali Assegaf didampingi Wakil Ketua Syaifullah Tamliha menemui Gubernur Provinsi Bali, Made Mangku Pastika, di Kantor Gubernur Bali, Senin (24/7).

**P**ertemuan tersebut membahas persiapan penyelenggaraan Konferensi *World Parliamentary Forum on Sustainable Development* yang akan diselenggarakan pada tanggal 6-7 September 2017 mendatang di Nusa Dua, Bali.

Pada pertemuan tersebut, Nurhayati menyampaikan bahwa DPR RI menginisiasi penyelenggaraan konferensi yang menurut UNEP menjadi

forum pertama yang membahas mengenai Sustainable Development (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan /SDGs) pada tingkat dunia.

Hal ini merupakan kebanggaan tersendiri untuk Indonesia. Diharapkan konferensi ini akan dihadiri sekitar 300 peserta dari anggota parlemen di seluruh dunia serta institusi internasional seperti UNEP, dan agen PBB lainnya, Women In Parliament, WPL, GOPAC, UN-SDSN, dan Infid. Nurhayati tidak lupa menyampaikan perkembangan terkini atas persiapan konferensi tersebut kepada Gubernur Bali.

Bali dipilih sebagai tempat konferensi karena memiliki budaya lokal yang erat dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, seperti Tri Hita Karana dengan budaya subaknya, serta memiliki strategi pencapaian pembangunan melalui konsep pembangunan yang “pro poor” (pro masyarakat miskin), “pro job” (pro

pekerjaan atau anti pengangguran) dan “pro growth” (pro pertumbuhan ekonomi), serta “pro culture” (pro budaya).

Made Mangku Pastika menyatakan kesiapan Pemerintah Provinsi Bali untuk mendukung suksesnya konferensi ini. Hal ini diwujudkan antara lain dengan dukungan untuk mengadakan cultural dinner yang akan dilaksanakan di kediaman Gubernur Bali.

Lebih jauh diharapkan forum ini dapat menjadi wadah bagi anggota parlemen untuk saling berbagi pengalaman dan praktek terbaik (best practice) dalam pelaksanaan Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) guna mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 tanpa ada seorangpun yang tertinggal (leave no one behind). ■

(si/mp), foto : dok-bksap dpr/ri



Ketua BKSAP DPR Nurhayati Ali Assegaf didampingi Wakil Ketua Syaifullah Tamliha berdialog dengan Gubernur Bali, Made Mangku Pastika

# Komisi III Akan Tingkatkan Anggaran Mitra Kerjanya

Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil mengkhawatirkan peredaran narkoba merusak generasi muda di Indonesia. Anggaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Kementerian Hukum dan Ham, perlu ditingkatkan guna mengetahui keberadaan dan memberantas produsen, bandar dan sindikat narkoba.

“Kami (Komisi III) akan mengevaluasi regulasi dan anggaran terkait operasi pengungkapan produksi dan peredaran narkoba,” katanya usai melakukan pertemuan dengan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Tengah, Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah, dan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, di Gedung Borobudur Polda Jawa Tengah, Jumat (21/7).

Dalam kunjungan ini, Nasir Djamil mengatakan, Komisi III ingin mengetahui sejauh mana Polda Jawa Tengah, BNNP Jawa Tengah, dan Kanwil Hukum dan Ham mengawasi peredaran gelap narkoba, upaya mencegah terorisme dan radikalisme, serta pengawasan terhadap orang asing.

“Dari laporan tersebut, tampaknya ada perkembangan yang baik bagaimana mereka bisa melakukan pengawasan terhadap orang asing, dan juga mengatasi upaya-upaya terorisme dan deradikalisme. Yang paling penting, kami melihat sinergisitas antara BNNP dengan instansi-instansi terkait dalam menanggulangi peredaran gelap narkoba,” ungkapnya.

Markas Besar Polri, BNN Pusat dan Kementerian Hukum dan Ham diharapkan bisa lebih meningkatkan kinerja antar instansi Jawa Tengah ini. Sebab tidak memungkiri bahwa keberadaan orang asing, narkoba, dan juga terorisme, itu saling terkait.

“Itu harapan kita di Komisi III, juga akan mengevaluasi regulasi dan anggaran terkait bagaimana bisa melakukan operasi BNNP dan Kementerian Hukum dan HAM,” tegasnya.

Terkait keberhasilan BNN dan Polri mengungkap kejahatan narkoba sebesar lebih dari 1 Ton, Politisi PKS ini mengatakan, dengan terungkapnya kasus itu artinya sudah bisa menyelamatkan

ratusan generasi muda. Tentu ini terkait dengan kerjasama BNN Provinsi dengan pihak-pihak lainnya.

Oleh karena itu, harapan ke depan, penemuan-penemuan ini bisa lebih ditingkatkan. Tentu saja mereka perlu diberikan dukungan peralatan dan teknologi. Menurut laporan Polda Jawa Tengah, masih sedikit sekali peralatan teknologi untuk melacak bandar-bandar dan sindikat-sindikat yang beroperasi di wilayah ini.



Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil

“Mudah-mudahan di Tahun 2018 tersedia anggaran untuk meningkatkan teknologi informasi guna melacak dan mengidentifikasi serta mengetahui keberadaan bandar-bandar dan sindikat narkoba bisa segera diatasi,” paparnya. ■ (as.mpi), foto : agung/hr

## Pansus Angket KPK Tidak Berniat Lemahkan KPK

Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa menegaskan kembali, bahwa DPR tidak berniat sedikitpun untuk melemahkan KPK sebagai sebuah institusi.



Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa

“Kita tidak ada niat sedikitpun untuk membubarkan bahkan melemahkan KPK, kita ingin menjadikan KPK sebagai lembaga yang kredibel, jujur dan tetap berani,” ujar Agun saat menerima Mahasiswa Universitas Trisakti dan Koalisi Rakyat Parlemen, di Gedung DPR RI, Rabu, (26/7).

Menurut Agun, Pansus Angket KPK mulai bekerja dari hulu hingga hilir Untuk hulunya kami berpedoman dari Laporan BPK terkait keuangan KPK. “DPR mulai masuk dari laporan BPK karena KPK merupakan



# Baleg DPR Utamakan Aspirasi Masyarakat

Badan Legislasi (Baleg) DPR berupaya keras menghimpun aspirasi dari berbagai stakeholder dalam penyusunan program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2018. Hal itu dimaksudkan agar legislasi yang dihasilkan DPR sesuai dengan aspirasi dan sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat banyak.

**A**tas dasar itu, rombongan yang dipimpin Wakil Ketua Baleg Firman Soebagyo melakukan kunspek ke Provinsi Sumatera Utara di Medan, Senin, (24/7).

“Tim kunjungan kerja Baleg ini untuk menyerap aspirasi yang mana ini merupakan tugas baru Baleg, dalam persiapan penyusunan prolegnas prioritas, sosialisasi terhadap RUU, mensosialisasikan UU yang sudah diundangkan sekaligus melakukan pemantauan terhadap implementasi UU,” kata Firman Soebagyo.

Wakil Gubernur Sumatera Utara, Nurhajizah Marpaung menyambut kehadiran Tim Kunspek di Ruang Rapat Kantor Gubernur Sumut. Dalam acara ini turut hadir berbagai lapisan masyarakat seperti organisasi masyarakat, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Medan, pengusaha kelapa sawit dan civitas akademika dari beberapa universitas



Wakil Ketua Baleg Firman Soebagyo

di Sumut. Mereka menyampaikan pandangan dan harapan agar Prolegnas RUU Prioritas 2018 dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Dalam pertemuan itu terdapat lima isu utama dan menjadi perhatian penting yang berkaitan langsung dengan Pemprov. Sumut. “Lima isu penting telah dibahas tadi diantaranya masalah RUU Perlindungan Beragama, RUU Minerba, RUU Perkelapasawitan, Dana Perimbangan Pusat dan Daerah, dan RUU Pertembakauan,” terang politisi Golkar itu.

Pimpinan Baleg dari Dapil Jateng ini menegaskan, dalam menyusun Prolegnas 2018 ini akan terus melibatkan berbagai pihak, termasuk dari DPD yang dalam kesempatan sama juga melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Utara. “Sehingga nanti semua masukan dapat diterima secara tertulis dan dipertanggungjawabkan oleh DPR,” sambung Firman.

Turut serta dalam kunspek Baleg ke Sumut ini antara lain, Wakil Ketua Baleg Totok Daryanto dan Dossy Iskandar Prasetyo, anggota Baleg yakni Irmadi Lubis, Diah Pitaloka, Dadang S. Muchtar, Endang Maria Astuti, Aryo P. S. Djojohadikusumo, Bahrum Daido, Taufiq R. Abdullah, Hermanto, Muhammad Iqbal, Sulaeman L. Hamzah, dan Rufinus Hotmaulana Hutauruk. ■

lembaga negara yang menggunakan keuangan negara. Kita ingin bagaimana keuangan negara yang digunakan dapat berimplikasi baik outcome, dan kinerjanya,” paparnya.

Agun menambahkan, dari sisi hilirnya, DPR juga telah menemui orang yang memang bersentuhan secara langsung dengan KPK. Ini juga berkaitan dengan koordinasi dan supervisi. “Kami juga langsung menemui kepolisian dan kejaksaan terkait kordinasi dan supervisi dengan KPK,” terangnya.

Awal dibentuknya KPK, lanjut Agun, DPR melihat bahwa fungsi Kepolisian maupun kejaksaan dalam melakukan penegakan hukum belum efektif karena itu KPK dapat mengambil alih kasus korupsi tersebut. “Namun nilai nominal kasus itu mencapai Rp 1 milyar, namun apa yang kami amati itu, muncul adanya miskordinasi yang menimbulkan hubungan yang tidak harmonis dengan penegak hukum lainnya hingga muncul kasus Cicak dan Buaya,” terangnya.

Hal tersebut, papar Agun, dapat membahayakan mekanisme demokrasi yang ada saat ini. “Yang kita inginkan bahwa tidak ada satupun kekuasaan

“DPR mulai masuk dari laporan BPK karena KPK merupakan lembaga negara yang menggunakan keuangan negara. Kita ingin bagaimana keuangan negara yang digunakan dapat berimplikasi baik outcome, dan kinerjanya”

atau lembaga negara yang tidak bisa dikritik,” tambahnya.

Sementara, Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun menegaskan, prinsipnya tidak ada satupun lembaga yang independen karena memang tujuan kita bernegara sesuai UUD 1945. “Namun dalam prosesnya mereka sebagai lembaga (KPK) boleh independen,” jelas Misbakhun. ■

(si), foto : iwan/hr.

(piska/mp) foto : piska/hr



Tim Kunspek Komisi IV DPR dipimpin Daniel Johan bersama para nelayan Jateng di BBPI Semarang

## Larangan Penggunaan Cantrang Akibatkan Pengangguran Massal

Nelayan Jawa Tengah mengeluhkan kebijakan Peraturan Kelautan dan Perikanan No 2/2015 tentang Pelarangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Trawl dan Seine Nets. Hal tersebut terungkap dalam pertemuan antara Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi IV DPR RI dengan Kepala Balai Besar Percontohan Penangkapan Semarang dan para nelayan Jateng, Jumat (21/7).

**K**epada Tim Kunspek Komisi IV yang dipimpin Daniel Johan (FPKB) itu, nelayan mengungkapkan, kebijakan Menteri KP terkait larangan penggunaan cantrang sudah dirasakan oleh para nelayan. Sudah banyak nelayan di Jawa Tengah khususnya yang telah ditangkap karena melanggar ketentuan yang



terdapat dalam Permen KP No. 2 Tahun 2015 itu.

Menurut perwakilan nelayan yang menghadiri pertemuan dengan Tim Kunspek Komisi IV, sejauh ini pemerintah telah menerapkan kebijakan Permen KP No. 2/2015 tersebut namun tidak memberikan solusi pengganti alat cantrang. Lebih lanjut, para nelayan sampaikan bahwa cantrang tidak merusak lingkungan seperti apa yang dituduhkan pemerintah.

Daniel lebih lanjut menjelaskan, kebijakan larangan penggunaan cantrang berdampak pada 17 jenis alat tangkap. "Akibatnya 38 ribu kapal mangkrak dan mengakibatkan pengangguran massal sebanyak 760 ribu nelayan," terang Daniel.

Daniel Johan dalam pertemuan itu mengungkapkan bahwa kebijakan larangan penggunaan cantrang hingga hampir 3 (tiga) tahun ini belum menemukan solusi dan jalan keluar. "Akibatnya memperparah dan memperburuk keadaan para nelayan seluruh Indonesia. Dampak kebijakan tersebut, banyak kapal nelayan yang mangkrak, tidak bisa berlayar," ungkap Daniel.

"Kebijakan Menteri KP tersebut, tidak mempertimbangkan aspek

sosial ekonomi nelayan, yang diperkirakan kerugiannya sebesar Rp 3,4 triliun/tahun," tegas Daniel.

Politisi PKB ini mengatakan, kunjungan Komisi IV ke Semarang itu bertujuan untuk menyerap aspirasi nelayan di pelabuhan perikanan yang terkena dampak, baik yang berhasil maupun tidak berhasil menerapkan penggunaan alat penangkap ikan alternatif. Selain itu kunjungan tersebut juga dimaksudkan untuk mengali informasi secara utuh dan langsung tentang berbagai teknologi, rekayasa, standarisasi, sertifikasi teknik penangkapan ikan yang ramah lingkungan. ■

(skr/mp), foto: singgih/hr

## BURT DPR Perjuangkan Aspirasi Masyarakat Papua Barat

Banyak Aspirasi yang disampaikan masyarakat di Provinsi Papua Barat yang masih harus diperjuangkan oleh para pengambil kebijakan di pusat pemerintahan. Pembangunan infrastruktur hingga wacana pemekaran daerah menjadi isu penting di Papua Barat.



Wakil Ketua BURT Agung Budi Santoso

Demikian terungkap dalam pertemuan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat di Manokwari, Selasa (25/7).

Wakil Ketua BURT Agung Budi Santoso yang memimpin delegasi BURT ini mengatakan, aspirasi masyarakat Papua Barat yang disampaikan lewat Asisten I Bidang Pemerintahan dan Otda Papua Barat Musa Kamudi perlu mendapat perhatian serius.

"Apa yang sudah disampaikan oleh Asisten I itu agar diperjuangkan, yaitu

usulan daerah otonomi baru di Papua Barat dan pembangunan infrastruktur," ujar Agung.

BURT sendiri lewat sosialisasi Rencana Strategis (Renstra) DPR 2015-2019 ke Papua Barat ini sekaligus ingin menyerap aspirasi masyarakat setempat. Bertempat di Ruang Multimedia, Kantor Gubernur Papua Barat, pertemuan diikuti oleh seluruh SKPD dan para pemangku kepentingan lainnya.

Sementara Musa Kamudi menyatakan, kunjungan BURT ini menjadi harapan baru bagi Pemprov Papua Barat ke depan. Banyak aspirasi daerah yang belum direalisasikan. Ia bahkan mengeluhkan, banyak aturan baru yang berubah-ubah dari pemerintah pusat, sehingga membuat daerah kesulitan untuk menyesuaikan diri.

Pada kunjungan kali ini, Anggota BURT yang ikut serta adalah Andy Fauziah Pujiwati, Anton Sukartono Suratto, Koeswiyanto, Anshory Siregar, Agus Sulistiyono, dan M. Syaiful Bahri Anshori. ■

(sck/mp) foto: sucl/hr

# Belum Ada Usulan RUU dari Daerah

Sejauh ini belum ada usulan RUU yang datang dari masyarakat daerah. Usulan RUU dari daerah hanya persoalan pemekaran. Saatnya masyarakat daerah juga proaktif mengusulkan RUU kepada DPR.



Tim Kunspek Baleg DPR saat berdialog dengan jajaran Pemprov Sulawesi Utara, di Manado

**K**etua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas dalam sambutan pertemuan dengan Pemprov Sulawesi Utara, di Manado, Senin (24/7), mengatakan, masyarakat di daerah bisa mengusulkan RUU apa saja yang menyangkut kepentingan daerah atau negara. Untuk itulah, Baleg terus berkomunikasi dengan masyarakat daerah agar ada aspirasi yang bisa diserap seputar kebutuhan adanya UU yang mengatur hal tertentu untuk kemajuan daerah.

“Akademisi dan stakeholder di daerah bisa menyampaikan daftar inventaris masalah atas RUU yang diusulkan oleh masyarakat daerah kepada DPR. Nanti Baleg akan mempelajarinya,” kata Supratman. Delegasi Baleg sendiri hadir di Manado untuk berdialog dengan

para pejabat daerah setempat tentang UU yang sudah disahkan DPR dan RUU yang masih dalam pembahasan. Prolegnas 2017 juga disampaikan kepada masyarakat daerah agar semua mengetahui produk perundang-undangan yang sedang digodok DPR.

Saat ini, setidaknya ada 49 RUU plus 11 RUU kumulatif terbuka yang masih dibahas DPR. Pada 2017 ini, ungkap Supratman, memang target RUU yang disahkan DPR tidak memenuhi target. Terakhir, RUU prioritas dan banyak menyita perhatian masyarakat adalah tentang Pemilu yang baru saja disahkan oleh Rapat Paripurna DPR. Diantara RUU yang belum disahkan DPR adalah RUU Minol. RUU ini mengundang banyak persoalan di daerah. Saat berdialog dengan pejabat daerah di Manado disampaikan, bagi sebagian

masyarakat daerah, minuman beralkohol adalah bagian dari tradisi adat. Untuk itu, perlu diatur dalam RUU tersebut.

“Ada 31 RUU yang masih dalam proses pembicaraan tingkat satu di DPR yang salah satunya adalah RUU Minol,” jelas Anggota F-Gerindra itu. Empat RUU, sambungnya lagi, dalam proses harmonisasi. Dan yang juga menuai kritik dan perhatian daerah adalah UU ASN. UU ini menyisakan persoalan di daerah terutama soal pengangkatan para pegawai honorer yang sudah puluhan tahun tak diangkat menjadi PNS. UU ini memang dalam bidikan untuk direvisi. “Mudah-mudahan Baleg bisa segera menyelesaikan semua ini. Dan pada 2018 bisa semakin mudah pula menyelesaikan semua RUU yang sedang dibahas,” harap Supratman yang didampingi Wagub Sulut Steven Kandouw. ■

(mh/imp), foto : husen/hr



# Audit Internal Harus Diperkuat Guna Perbaiki LKPP

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Adisatrya Suryo Sulisto meminta pemerintah untuk tegas terhadap kementerian dan lembaga yang memperoleh predikat tidak memberikan pendapat (TMP) atau disclaimer dalam laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) tahun 2016. Menurutnya perlu diberikan sanksi tegas agar tahun mendatang tidak memperoleh predikat serupa.

**D**emikian disampaikan dalam rapat kerja Banggar DPR dengan Menteri Keuangan, Kepala Bappenas dan Gubernur Bank Indonesia, Selasa, (25/07).

“Setelah mencermati LKPP 2016 dan LHP BPK, fraksi PDI Perjuangan berpandangan BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pada LKPP 2016 tetapi dalam catatannya terdapat 6 lembaga yang mendapat opini TMP. Hal ini perlu jadi perhatian pemerintah dalam memberikan laporannya,” ujar Adisatrya.

Politisi PDI Perjuangan ini

meminta kepada seluruh kementerian dan lembaga untuk senantiasa memperkuat audit internal untuk memberikan pencegahan dini dalam laporan keuangan sebelum diserahkan kepada BPK. “Audit internal harus diperkuat untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan sebelum diperiksa BPK,” tegasnya.

Kementerian dan Lembaga yang mendapat status disclaimer atau tidak memberi pendapat oleh BPK yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Lembaga Penyiaran Publik TVRI, Badan

Keamanan Laut dan Badan Ekonomi Kreatif.

Sementara Kementerian dan Lembaga yang mendapat wajar dengan pengecualian yakni Kementerian Pertahanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Komisi Pemilihan Umum, Badan Informasi Geospasial, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Lembaga Penyiaran Republik Indonesia. ■

(ns/mp), foto : andri/itr.



Ketua Banggar DPR Azis Syamsudin dengan Menteri Keuangan

# MoU PIA DPR - Komnas PA, Bukti Komitmen Lindungi Anak Indonesia



Ketua Umum PIA DPR Deisti A. Novanto bersama Ketua Komnas Perlindungan Anak Arist Metdeka Sirait

Memperingati Hari Anak Indonesia yang jatuh setiap tanggal 23 Juli, PIA DPR RI menggelar perayaan dengan tema "Tersenyumlah Anak Indonesia, Tersenyumlah Indonesiaku".

**K**etua Umum PIA DPR RI Deisti A. Novanto dalam sambutannya mengatakan tujuan diselenggarakannya acara ini tidak lain untuk mengembalikan senyum anak Indonesia yang belakangan sedikit memudar akibat beberapa peristiwa kekerasan terhadap anak. Baik kekerasan fisik atau verbal, kekerasan non verbal bahkan pelecehan seksual.

"Peristiwa-peristiwa kekerasan terhadap anak itu tentu sangat memprihatinkan. Tidak hanya karena terenggutnya hak anak, melainkan juga hilangnya keceriaan anak yang notabene merupakan generasi penerus bangsa, harapan bangsa. Untuk itulah kami mencoba mengembalikan senyum anak-anak Indonesia. Dengan kata lain PIA turut mendukung lahirnya generasi emas," papar Deisti di Gedung Nusantara IV DPR RI, Senayan Jakarta, Rabu (26/7/2017)

Dalam acara ini selain dihadiri oleh Wakil Ketua PIA, Grace Fadli Zon dan anggota-anggota PIA lainnya, hadir pula Ketua Komnas Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait, anggota DPR RI Eva Kusuma Sundari dan Tooti Roosdiono, Psikolog Anak Roslina Verauli, Istri Gubernur DKI

Jakarta Happy Djarot, serta anak-anak Indonesia dari Panti Sosial Anak Putra Utama I, perwakilan Siswa-Siswi SD Al Ikhlas, SD St Theresia, dan Anak-anak berkebutuhan khusus binaan Pemda Provinsi DKI Jakarta.

Sebagai bentuk komitmen PIA DPR RI dalam turut serta memberikan ruang dalam menyalurkan

minat dan kreatifitasnya serta ikut serta dalam perlindungan terhadap hak-hak anak, PIA DPR menandatangani nota kesepahaman atau MoU dengan Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA).

Dengan MoU ini, lanjut Deisti, PIA DPR RI secara tidak langsung menjadi duta perlindungan hak anak yang akan dibawa ke daerah pemilihan (Dapil) masing-masing. Lebih lanjut ia berharap agar DPR RI

segera mengesahkan Undang-Undang Anti Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan untuk lebih bisa memberikan perlindungan terhadap anak secara utuh.

Sementara itu Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait mengatakan saat ini Indonesia sudah masuk pada level darurat kekerasan anak. Kekerasan itu seolah-olah menjadi sebuah candaan. Bukan lagi dianggap sebagai tindak pidana atau kejahatan. Kalau itu terjadi maka kekerasan terhadap anak-anak akan terus terjadi

Disinilah diperlukan peran keluarga. Keluarga jadi benteng untuk melindungi anak dari tindak kekerasan baik di dalam maupun luar rumah. Ketua Panitia acara HAN dari Fraksi PDI Perjuangan, Shinta Maruar Sirait bersyukur acara yang disiapkan dalam waktu dua minggu itu berlangsung lancar. Ia berharap seluruh pihak turut memberikan perlindungan yang utuh kepada anak.

Komunikasi orangtua kepada anak sangat penting untuk menanamkan pendidikan sekaligus benteng pertahanan anak dari berbagai paham radikalisme, intoleransi dan tindak kekerasan. ■

(ayulmp), foto: kresno/hr

## Komisi VIII Berbagi Pengalaman Kerukunan Umat dengan Parlemen Uni Eropa

Keberagaman budaya, suku bangsa, dan bahasa di seluruh tanah air dikelola dengan baik melalui empat pilar, yakni Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sehingga, sosialisasi empat pilar itu pun bukan hanya di dalam negeri, namun juga diperkenalkan kepada bangsa-bangsa lain.

**D**emikian ditekankan Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid saat berbagi pengalaman mengenai pengelolaan kerukunan umat dan keberagaman bangsa dengan delegasi Parlemen Uni Eropa, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (25/7/2017). Dalam kesempatan ini, hadir juga sejumlah pimpinan dan anggota Komisi VIII DPR lainnya.

"Kami bersyukur bahwa ada delegasi dari Parlemen Eropa yang datang ke Indonesia untuk membahas tentang keragaman dan kerukunan beragama. Saya menjelaskan bahwa dasar pengelolaan keberagaman dan kerukunan adalah yang kita pegang selama ini, empat pilar. Diskusi menunjukkan kekaguman empat prinsip yang kita miliki dan kita pegang teguh," kata Sodik, usai diskusi.





Politisi F-Gerindra itu menambahkan, dalam kesempatan itu juga dibahas mengenai sila-sila dalam Pancasila, pembagian kekuasaan berdasar UUD 1945, hingga prinsip-prinsip dalam NKRI. Salah satu hal yang menarik perhatian Sodik adalah pertanyaan terkait masih tidaknya masyarakat Indonesia terhadap Pancasila sebagai ideologi negara.

“Beberapa prinsip Pancasila itu ternyata lebih maju dari apa yang delegasi rasakan, yang dianggap sebagai ancaman. Pancasila, demokrasinya kepada sebuah nilai yang paling besar, yakni musyawarah mufakat. Kita percaya pada Pancasila atas dasar sejarahnya, fakta-faktanya, dan atas dasar visi misi ke depannya,” jelas Sodik.

Politisi asal dapil Jawa Barat itu pun yakin, jika muncul dinamika yang ekstrem atau inkonstitusional, berarti hal itu sudah keluar dari norma-norma Pancasila.

Dalam kesempatan yang sama,



Anggota Komisi VIII DPR berfoto bersama delegasi Parlemen Uni Eropa

anggota Komisi VIII DPR Deding Ishak menambahkan, pertemuan ini menjadi kesempatan bagi DPR, khususnya Komisi VIII untuk menjelaskan kepada bangsa-bangsa di Uni Eropa terkait penyelenggaraan negara Indonesia, dalam nuansa demokrasi.

“Pancasila menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk bidang politik. Semuanya tentu

ada kearifan lokal. Walaupun ada kepentingan lokal dalam konteks otonomi, tetapi semuanya harus mengacu pada kepentingan nasional,” tegas Deding.

Politisi F-PG itu menambahkan, bangsa akan semakin maju jika keberagaman agama, etnis, budaya, dan keberagaman lainnya dijaga dan diperkuat. Apalagi, keberagaman itu hanya dimiliki oleh Indonesia, dan tidak dimiliki oleh negara lain.

“Ini menjadi modal sosial dalam memperkuat Pancasila sebagai ideologi bangsa, sebagai sikap hidup dan pedoman seluruh anak bangsa, dalam mewujudkan cita-cita bangsa,” tutup politisi asal dapil Jawa Barat itu.

Pertemuan berlangsung dengan hangat dan antusias, delegasi Parlemen Eropa mendengarkan penjelasan dari pimpinan dan anggota Komisi VIII DPR. Diskusi ditutup dengan pemberian cenderamata dan foto bersama. ■

(s/fmp) foto:ojie/hr

## Penerimaan Pajak Sulit Terealisasi



Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan

Penerimaan pajak untuk APBN 2017 dinilai sulit terealisasi lagi. Ada yang keliru dari penetapan asumsi dan target pajak 2017. Ini juga dibuktikan dengan rencana Menkeu merevisi asumsi penerimaan pajak dari 16 persen menjadi 13 persen.

Demikian penegasan anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan dalam rilisnya, Senin (24/7/2017). “Dalam APBN 2017, target penerimaan pajak dipatok sebesar Rp 1.498,9 triliun atau naik 16,7 persen dibanding realisasi penerimaan pajak tahun 2016 sebesar Rp 1.284,9 triliun. Target tersebut sebetulnya kurang realistis sehingga akhirnya harus direvisi,” ungkap Heri.

Menurut Anggota F-Gerindra ini, hanya ada dua kemungkinan tidak terealisirnya target pajak, kesalahan kebijakan atau kinerja petugas pajak di lapangan yang tidak optimal. Melesetnya target pajak ini terjadi hampir setiap tahun. Walau kebijakan sudah disempurnakan, tetap saja target meleset. Kinerja Direktorat Jenderal Pajak juga mesti dibenahi.

“Melencengnya realisasi penerimaan pajak dari target menandakan ada kontra antara rancangan kebijakan dengan kinerja penerimaan pajak yang ada di APBN. Tidak aneh bila kemudian asumsi-asumsi yang ada, sering sekali direvisi, yang akhirnya mengganggu kredibilitas APBN,” ucap Heri. Dirjen Pajak, sambungnya, harus mampu mengambil pelajaran pada setiap kali realisasi penerimaan pajak.

Lebih lanjut Heri mengungkapkan, PPh non-migas cenderung menurun. Pada realisasi tahun 2016 hanya sebesar Rp 630,1 triliun atau 76,9 persen dari target APBN-P 2016 sebesar Rp 819,5 triliun. Realisasi penerimaan sumber daya alam juga hanya Rp 64,9 triliun atau hanya 72,6 persen dari APBN-P 2016 sebesar Rp 90,5 triliun. “Penyebab tidak tercapainya target tersebut dapat dilacak pada penerimaan migas yang hanya Rp 44,9 triliun atau hanya 65,3 persen dari APBN-P 2016,” imbuh Heri.

Pada bagian lain, Heri menyampaikan temuan BPK tentang potensi penerimaan negara dari sektor pajak yang belum dioptimalkan sebesar Rp 1,69 triliun. Potensi itu berupa pajak yang belum tertagih dan denda keterlambatan. Ini harusnya sudah bisa diantisipasi oleh dirjen teknis seperti Dirjen Pajak, ketika menyusun rencana dan target pada tahun-tahun selanjutnya.

“Kita tidak bisa menunggu pulihnya kinerja ekspor-impor nasional untuk mendorong kinerja penerimaan PPh Non-Migas serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sebab, kinerja ekspor-impor nasional belum bisa diandalkan untuk menjadi tumpuan karena belum pulihnya perekonomian global,” paparnya lagi. ■

(mh/imp), foto : andri/hr

# Muratarata Siap Cetak Sawah Baru

Indonesia diharapkan mencapai swasembada pangan, karena itu diperlukan percepatan peningkatan produksi pangan. Untuk merealisasikan hal itu, beberapa program upaya khusus disusun, salah satunya adalah program cetak sawah baru yang sangat terkait dengan kesiapan daerah untuk melaksanakannya

“Kita lihat di belakang kita ini adalah hamparan lahan luas yang memang belum terolah menjadi sektor pertanian, kita akan membuat lahan ini menjadi sawah normal. Airnya ada, lahannya ada, kelompok taninya dan bupatinya siap dengan semuanya tinggal sekarang diberikan kesempatan membangun dengan anggaran yang cukup,” ujar Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo (F-Gerindra) di sela-sela peninjauan lahan cetak sawah baru di Desa Remban, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratarata), Sumatera Selatan, Sabtu, (22/7/2017).

Kepada Tim Kunspek Komisi IV DPR RI, Bupati Muratarata, H. M. Syarif Hidayat menjelaskan bahwa rencananya akan dicetak lahan sawah sebanyak 500 Ha. Masing-masing di Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu seluas 200 Ha dan di Desa Pauh Kecamatan Rawas

Ilir seluas 300 Ha. Dengan harapan di kemudian hari lahan tersebut tidak dialihfungsikan ataupun dijualbelikan.

Menanggapi hal ini, anggota Komisi IV Fauzih Amro menghimbau agar bupati segera menerbitkan peraturan yang menjaga status keberadaan lahan ini. “Nanti lewat pak bupati ini dipersiapkan peraturan, kalau sifatnya sudah Perbup ataupun Perda maka tidak bisa dialihfungsikan apalagi dijual. Selama ini petani menggarap hanya setahun sekali, akhirnya menjadi buruh di perkebunan karet dan kelapa sawit yang tidak stabil, sehingga tidak ada peningkatan penghasilan” ujar politisi Partai Hanura ini.

“Dengan pengadaan cetak sawah baru ini, harapan petani bisa menjadikan Muratarata sebagai basis lumbung padi di Sumatera Selatan dan mempertahankan warisan leluhur kita sebagai petani. ■



(ran/mp), foto: Rizka/hr



Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo saat meninjau lahan cetak sawah baru di Desa Remban, Sumsel

Sekitar 300 Kepala Keluarga (KK) di Desa Kawungsari, Kecamatan Cibeureum, Kabupaten Kuningan yang terkena dampak pembangunan Waduk Cileuweung, yang kini berganti nama menjadi Bendungan Kuningan, mengadakan nasib (curhat) mengenai nasib ganti untung maupun relokasinya kepada Tim Komisi IV DPR RI yang berkunjung ke desa tersebut.



## Warga Desa Kawungsari Curhat Ke Komisi IV DPR

Tim Kunspek Komisi IV DPR dipimpin Wakil Ketua Herman Khaeron saat meninjau Waduk Cileuweung, Kuningan

**T**erkait relokasi Desa Kawungsari, warga yang rumahnya terkena pembangunan Bendungan Kuningan hingga kini belum ada kepastian ganti untung. "Untuk itu, Komisi IV DPR RI melakukan tinjauan langsung ke tempat ini dan ingin melihat dan mendengarkan permasalahan apa yang terjadi di sini," jelas Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron usai melakukan diskusi di Kantor Desa Kawungsari, Kecamatan Cibeureum, Kabupaten Kuningan, Jum'at (21/07/2017).

Menurut penjelasan pemerintah dalam pertemuan dengan Komisi IV DPR RI permasalahan nasib 300 KK Desa Kawungsari yang terkena dampak pembangunan Bendungan Kuningan untuk lahan relokasinya sudah ada, juga akan dibuatkan lahan pesawahan baru seluas kebutuhan relokasi. Disamping itu masyarakat yang menjadi bagian relokasi

akan diberikan bantuan permodalan untuk bertani dan berternak.

Lebih lanjut Herman menjelaskan Bendungan Kuningan yang akan menenggelamkan lima desa saat ini terus berlangsung. Nilai investasi yang digelontorkan Pemerintah Pusat dan Pemrov Jawa Barat pun mencapai ratusan miliar. Memang tak sekaligus anggaran pembangunan bendungan dikucurkan pemerintah. Mega proyek seluas 284,5 hektare yang berdampak terhadap lima desa dan dua kecamatan itu didanai pemerintah melalui APBN yang bersifat multi years.

"Peta permasalahan penyelesaian Bendungan Kuningan sebenarnya terletak pada pembebasan tanah masyarakat yang menjadi bagian pembangunan bendungan tersebut," imbuhnya.

Jika pembangunan waduk, maka warga Kawungsari hanya akan

mengenang perkampungan yang sudah puluhan tahun ditinggalinya. Pasalnya, penduduk di desa ini semuanya akan direlokasi karena desanya akan ditenggelamkan. Dari empat desa yang terkena proyek pembangunan waduk, hanya Desa Kawungsari yang seluruh warganya harus direlokasi. Lima desa lainnya cuma sebagian saja lahannya yang dibebaskan. Tentu sangat berat bagi warga setempat yang sudah beranak pinak sejak zaman dulu di desa tersebut.

Berikut desa-desa yang akan terkena dampak pembangunan Bendungan Kuningan ini meliputi 5 desa dan 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Cibeureum (Desa Randusari, Desa Kawungsari, Desa Sukarapih) dan Kecamatan Karangkencana (Desa Tanjungkerta dan Simpay Jaya) Kabupaten Kuningan. ■

(Andri/mp), foto : Andri/hr.

# Sekjen DPR RI Apresiasi Kehadiran Sespimti Polri

Sekjen DPR RI Achmad Djuned mengapresiasi kehadiran siswa-siswa Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri. Hal tersebut terungkap saat Sekjen DPR RI didampingi Deputy Persidangan DPR RI, Damayanti menerima Siswa Sespimti Pendidikan Reguler ke-26 di ruang rapat Sekjen DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (21/7/2017).

“Ini merupakan agenda pendidikan dari Sespimti Polri ke lembaga-lembaga negara, salah satunya adalah DPR RI. Mereka ingin mengetahui bagaimana mekanisme kerja dewan, bagaimana masalah demokrasi, serta hal-hal yang terkait tentang kemiripan antara DPR RI dengan pemerintah lembaga atau instansi lainnya. Untuk itu saya sangat mengapresiasinya,” jelas Djuned.

Pada kesempatan itu Djuned menjelaskan tentang tiga fungsi DPR RI yakni fungsi legislasi, kontroling atau pengawasan, serta fungsi budgeting atau anggaran. Fungsi-fungsi tersebut dijalankan oleh sebelas komisi yang ada plus lima alat kelengkapan dewan (AKD) DPR RI, seperti Badan Anggaran, Badan Legislatif, Badan Kerjasama Antar Parlemen, serta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Dengan demikian masing-masing Komisi atau AKD itu memiliki bidang kerja serta mitra yang berbeda-beda. Komisi III misalnya yang membidangi masalah hukum dan HAM serta keamanan, bermitra dengan Polri dan Kementerian Hukum dan HAM.

Pemaparan Djuned itu seketika mengundang keingintahuan atau pertanyaan dari siswa Sespimti yang didampingi oleh Brigjen (Pol) Slamet Rahardjo. Misalnya terkait tentang kemitraan DPR RI dengan Polri, baik itu tentang fungsi pengawasan DPR RI terhadap kinerja Polri, khususnya pola penanganan tindak pidana yang dilakukan Kepolisian apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan. Serta dukungan DPR RI terhadap Polri.

Tidak hanya itu siswa Sespimti juga mempertanyakan tentang fungsi legislasi DPR RI yang dinilai sangat lambat. Sebut saja Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP yang merupakan payung dari segala hukum. Pembahasan RUU ini diketahui sejak periode sebelumnya, namun hingga saat ini belum berhasil

jika ada ketidaksesuaian, Komisi III akan langsung menghubungi atau memanggil Kapolri dan jajarannya untuk meminta penjelasan kejadian atau peristiwa yang dimaksud.

Sementara untuk lambannya fungsi legislasi yang dilakukan oleh DPR RI dilihat dari produk hukum yang dihasilkan, Djuned mengaku hal tersebut bukan semata tanggung jawab DPR RI. Ada pihak pemerintah yang juga ikut membahas tentang RUU tersebut. Terkadang

pemilihan waktu antara DPR RI dengan pihak pemerintah untuk menggelar rapat selalu tidak sesuai karena adanya berbagai hambatan.

“Contohnya RUU KUHP, jika RUU lain hanya memiliki paling banyak 500 DIM (daftar inventaris

masalah). Namun khusus RUU KUHP yang merupakan payung dari berbagai peraturan lainnya itu memiliki tiga ribu DIM. Sebanyak dua ribu DIM sudah dibahas dalam RUU KUHP ini, masih ada seribu lebih DIM yang menunggu pembahasan. Sementara pembahasan untuk satu DIM saja membutuhkan waktu dan perdebatan yang tidak sebentar,” pungkasnya. ■



Sekjen DPR RI Achmad Djuned didampingi Deputy Persidangan, Damayanti foto bersama Siswa Sespimti Polri Pendidikan Reguler ke - 26

dituntaskan.

Menjawab hal itu Djuned menjelaskan bahwa DPR RI terutama Komisi III sebagai mitra kerja Polri sangat mendukung kinerja Polri, dukungan itu terlihat dari peningkatan anggaran yang disetujui DPR RI. Terkait dengan pola penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh Polri selama ini, Djuned mengatakan bahwa

(ayuso, foto: jayadhr)

## Komisi X Dorong Daerah Istimewa Yogyakarta Tarik Kunjungan Wisman

Komisi X DPR RI mendorong Provinsi D.I Yogyakarta untuk semakin berperan dalam menarik kunjungan turis, guna tercapainya target 20 juta wisatawan mancanegara (wisman) pada tahun 2019. Apalagi, Yogyakarta merupakan daerah tujuan wisata terbesar kedua di Indonesia setelah Bali.

“Kami ingin melihat persiapan dan kesiapan Joglosemar (Jogja, Solo dan Semarang) untuk mencapai 2 juta wisatawan seperti yang ditargetkan Kementerian Pariwisata. Namun, besar harapan kami, agar D.I Yogyakarta bisa memberikan peran yang cukup besar dalam rangka mewujudkan target 20 juta wisatawan,” ungkap Wakil Ketua



Komisi X DPR RI Ferdiansyah saat memimpin Tim Kunker Komisi X meninjau objek wisata Gunung Api Purba Nglanggeran, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, Senin (24/7).

Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta, jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2011 adalah 1.607.694 orang dan meningkat 156 persen pada akhir tahun 2015, dengan total wisatawan 4.122.205 orang. Peningkatan ini didukung dengan beragamnya jenis objek wisata yang berkembang di Yogya.

Untuk menambah jumlah wisatawan, politisi dari F-Golkar ini juga mengingatkan pemda setempat agar pemerataan pengembangan pariwisata di Yogya, mesti didukung dengan perencanaan dan tata kelola yang baik sehingga lebih banyak menarik wisatawan nusantara (wisnus) dan juga wisman. Misalnya, wilayah Kabupaten Gunung Kidul dengan kondisi



Tim Kunker Komisi X DPR saat meninjau objek wisata Gunung Api Purba Nglanggeran

geografis pegunungan, bisa dimanfaatkan untuk wisata alam. "Khususnya gunung api purba ini yang sudah ditetapkan menjadi Geopark oleh UNESCO sebagai salah satu situs geologi tertua," sambungnya.

Menurutnya penetapan situs Gunung Api Purba Nglanggeran oleh UNESCO menjadi penting dalam catatan perkembangan geologi dunia, sehingga

diharapkan mampu menjadi daya tarik wisman, terutama yang ingin melakukan penelitian gunung berapi.

Selain itu, Ferdi menambahkan, koordinasi antar instansi maupun kementerian di tingkat pusat dan daerah sangat penting untuk mendukung akselerasi pengembangan pariwisata di Yogya dan di tempat lainnya. Nantinya, lanjut Ferdi, Komisi X akan memanggil mitra terkait, diantaranya Kementerian Pariwisata, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar bersinergi dalam membuat program atau atraksi berupa tarian tradisional untuk dipertontonkan kepada wisatawan domestik dan mancanegara.

"Jika ada 20 atraksi yang sudah terjadwal dengan baik, maka wisatawan yang berkunjung tidak kebingungan lagi akan melakukan apa, karena sudah ada program yang sudah terjadwal tahunan secara rutin," papar politisi dapil Jabar XI ini. ■

(ann/mp), foto: anme/hr

## Pemerintah Diminta Lakukan Percepatan Wisata Banyuwangi

Ketua Tim Kunjungan Spesifik Bidang Pariwisata Komisi X DPR RI Ridwan Hisjam mengapresiasi kemajuan Banyuwangi dalam mengembangkan pariwisata.

la menyatakan akan meminta kepada pemerintah untuk melakukan percepatan pariwisata di Banyuwangi, terutama di pengembangan destinasi alam seperti Kawah Ijen yang sudah menjadi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) serta Alas Purwo dan Sukamade tempat wisata yang masuk kawasan Taman Nasional.

"Untuk mencapai target kunjungan 20 juta wisatawan mancanegara dan pariwisata sebagai penyumbang devisa terbesar, maka pemerintah harus melakukan percepatan penataan kawasan wisata. Presiden diharapkan bisa turun tangan," paparnya kepada media usai pertemuan dengan Bupati Banyuwangi di Pendopo Kabupaten Banyuwangi, Sabtu (22/7/2017)

la menjelaskan sudah

meminta Kementerian Pariwisata untuk membuat *academic paper* untuk mengkaji ulang undang-undang tentang penataan kawasan yang bisa menopang pengembangan wisata.

"Banyuwangi bisa memadukan konsep alam dan budaya yang dimiliki merupakan perpaduan yang tepat untuk wisata," kata

anggota dewan dari dapil Jatim V ini.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menyatakan senang atas kunjungan Komisi X ke Banyuwangi ini. Ia berharap ini bisa membawa angin segar bagi perkembangan pariwisata daerah.

"DPR adalah mitra pemerintah dan merupakan lembaga strategis untuk mengakselerasi pembangunan, termasuk untuk sektor pariwisata," mantapnya.

Terkait penataan kawasan wisata, lanjut Anas, sebetulnya sudah ada tim percepatan untuk penataan kawasan kluster Bali Barat dan Banyuwangi yang saat ini sudah bekerja. Namun lewat kunjungan Komisi X ini, ia berharap dewan bisa memberikan perspektif bagi tim percepatan. ■

(sc/mp), foto: suciati/hr



Tim Kunspek Bidang Pariwisata Komisi X DPR saat kunjungi Banyuwangi



Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih saat meninjau Komplek Candi Arjuna di Dieng

## Aksesibilitas Wisata Dieng Belum Penuhi Syarat

Perlu ada sinergitas antara Kementerian Pariwisata, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian PU PERA terkait pengembangan destinasi wisata di Kawasan Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara. Mengingat akses jalan yang ada saat ini masih belum memenuhi syarat sebagai destinasi pariwisata nasional.

**D**emikian dikatakan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih saat meninjau Komplek Candi Arjuna di Dieng, Jawa Tengah, Sabtu (22/7).

“Jumlah wisman dan wisnus yang datang ke sini akan jauh dari target yang ingin dicapai, kalau aksesibilitasnya masih seperti ini. Sehingga perlu didesak mengenai pengerjaan pembangunan jalan Tol Jakarta - Semarang, selain itu harus juga difasilitasi akses jalan dari tol menuju kawasan wisata strategis nasional,” ucap Fikri.

Menurutnya, semua problematika yang dihadapi tersebut tidak akan menjadi

suatu masalah, kalau semua pihak, dalam hal ini kementerian-kementerian terkait dapat duduk bersama. “Kalau ternyata memang kita banyak kendala, maka bisa juga melibatkan pihak swasta, namun dengan catatan jangan sampai menimbulkan penilaian miring seperti yang pernah ada sebelumnya, yakni hal itu hanya akan membesarkan swasta, dan masyarakatnya ditinggalkan tanpa mendapat manfaat apapun,” tandasnya.

Fikri juga mengatakan, kalau bidang pariwisata ingin dijadikan andalan penerimaan devisa negara, maka pemerintah harus bisa memenuhi unsur aksesibilitas, amenitas atau sarana

penunjang, dan atraksi.

Sementara untuk Kawasan Wisata Candi Borobudur yang juga dikunjunginya, Fikri menilai sudah ada perkembangannya, meskipun masih ada tuntutan dari badan pengelola kawasan candi tersebut.

“Ke depan, peran masyarakat akan lebih diberdayakan. Misalnya untuk mengelola *home stay* dan sebagainya. Jangan sampai ada lagi pandangan negatif yang mengatakan bahwa ada candi yang dijuluki sebagai salah satu keajaiban dunia, tetapi masyarakatnya hanya menjadi tukang parkir dan tukang asongan,” pungkasnya. ■

(dep/mp), foto : ryan dep/hr

# Hentikan Peradilan Sesat KPK

Tujuan dibentuknya Panitia Khusus Angket KPK merupakan upaya DPR RI untuk menelusuri kebenaran dan keadilan, jangan sampai lembaga penegak hukum justru menghasilkan peradilan yang sesat.

Wakil Ketua Pansus Angket, Masinton Pasaribu mewanti-wanti hal tersebut sesaat setelah Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Muchtar Effendi dan Niko Panji Tirtayasa.



Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa dan Pimpinan Pansus Angket dengan Muchtar Effendi

“Kalau cara-cara seperti ini dibiarkan, kita khawatir proses peradilan sesat itu akan berlanjut terus. Dan tentu keterangan dari para saksi yang kita panggil ini akan kita dalam, akan kami kroscek kembali kebenarannya nanti, baik bersama KPK terhadap orang-orang yang terlibat,” tandas Masinton, di Gedung Nusantara, Selasa (25/7) malam.

Dia menyebut peradilan sesat tentu sangat beralasan, karena apa yang disampaikan Niko dan Muchtar dengan kemarin yang disampaikan Yulianis, diungkapkan para saksi tersebut, KPK banyak melakukan rekayasa, pengkondisian bahkan tekanan terhadap saksi atau target

yang akan ditsangkakan KPK.

“Ada benang merah, bahwa persoalan dalam penanganan kasus-kasus di KPK, benang merahnya apa, ada rekayasa, ada paksaan, ada pengkondisian, ada orang yang ditarget dari memberikan keterangan palsu,” ujar Masinton.

Bahkan harta terdakwa yang disita Jaksa KPK tidak jelas ke mana, karena menurut pengakuan Muchtar hartanya sampai saat ini tidak dikembalikan KPK. Padahal harta tersebut menurut keputusan MA tidak ada hubungannya dengan korupsi Akil Mochtar. Masinton menegaskan jangan sampai KPK atas nama pemberantasan korupsi malah justru mengambil hak warga negara yang tidak bersalah.

“Pejabat yang ditarget, ada (harta)

yang sudah disita tapi kemudian tidak diberikan ke negara. Masih dalam pengelolaan dan penguasaan orang lain. Kita tidak mau ada korupsi atas nama pemberantasan korupsi,” paparnya.

Muchtar Effendi dalam kesaksiannya menyampaikan, penyidik KPK telah menyita sejumlah harta yang dia anggap tidak berkaitan dengan kasus korupsi. Aset itu sampai sekarang belum kembali diantaranya 25 unit mobil dan 45 unit motor, tiga unit rumah, dan dua bidang tanah.

“Malah pada 2016 saya didatangi oleh pihak KPK yang mengaku utusan Johan Budi terkait harta yang disita tersebut. Mereka menawarkan harta saya akan dikembalikan jika dibagi dua dan hak jual diberikan kepada mereka. Saya tidak setuju, itu harta halal saya,” ungkap Muchtar.

Kejanggalan lain yang dilakukan KPK, seperti yang diakui Niko, dia dipaksa oleh penyidik KPK untuk memberikan kesaksian yang memberatkan para terpidana perkara ini. Mereka adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, orang dekat Akil, Muchtar Effendi, Wali Kota Palembang Romi Herton, dan Bupati Empat Lawang, Budi Antoni Aljufri. “Saya disuruh mengaku mengetahui segala kegiatan paman saya, Muchtar Effendi, dan mengaku saya adalah ajudan, asisten pribadi, dan sopir paman saya,” jelasnya.

Dalam proses memberi kesaksian itu, Niko mengaku disandera oleh penyidik KPK di sebuah rumah di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Selama penyekapan, dia dipaksa bekerjasama dan harus mengikuti semua keinginan KPK. “Mereka mengancam akan memenjarakan anak dan istri saya karena ikut mencicipi (duit) dari Muchtar Effendi,”

(eko.mp), foto: iwan/hr.



Suasana Paripurna DPR RI dengan agenda pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Pemilu, Kamis (20/7). Foto: Azka

Suasana pertemuan Pansus Angket DPR tentang Pelindo II dengan BPK terkait perkembangan proses audit investigatif BPK terhadap sejumlah kasus Pelindo II, Rabu (27/7). Foto: Iwan



Suasana pertemuan Komisi VIII DPR RI dengan Delegasi Parlemen Uni Eropa terkait pengalaman pengelolaan kerukunan umat dan keberagaman bangsa, Selasa (25/7). Foto: Oji